



RENCANA KERJA – PERUBAHAN (RENJA-P) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WOLTER MONGINSIDI NO. 1 TELP. (0541) 20900020-28 KODE POS. 75511
TENG GARONG.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021** dapat diselesaikan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan ini pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Perubahan Rencana Kerja SETDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu satu tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Sekretariat Daerah sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja.

Dokumen Rencana Kerja PD Perubahan oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai selama tahun 2021 setelah evaluasi semester Pertama, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan sempurnaan dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten akan sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen RENCANA KERJA PERUBAHAN Tahun 2021 ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 5 Juli 2021

Sekretaris Daerah

Drs. H. Sunggono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198701 1 001

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN ii TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	35
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Program dan Kegiatan	39
BAB IV PENUTUP	49

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD

Evaluasi pelaksanaan Renja Semester 1 tahun 2021 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Sekretariat Daerah melalui analisis terhadap kinerja output dan kinerja keuangan. Pencapaian kinerja output akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas, sedangkan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Program nasional menurut Permendagri 90 tahun 2019 dan kepmendagri 050 tahun 2020, yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk bidang pemerintahan terdapat 3 program yang meliputi: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian Dan Pembangunan. Ketiga program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dilingkungan Sekretariat Daerah, program ini dilaksanakan dibawah Asisten Administrasi Umum yang diampu oleh 4 Bagian, diantaranya Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Bagian perencanaan dan Keuangan.

Program ini dilaksanakan dalam rangka membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Tugas bagian umum diantaranya melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Tugas bagian Organisasi adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. Untuk bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas melaksanakan penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan

Hingga semester 1 tahun 2021 program ini telah terlaksana dengan kisaran capaian kinerja di angka 30% hal ini diantaranya pelaksanaan pembiayaan rutin kantor, pelaksanaan protokoler pimpinan serta penyediaan gaji ASN dan non ASN dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

Program ini merupakan tugas pokok dan fungsi asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

Program ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama, pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra; pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra.

Dalam implementasinya program ini diampu oleh 4 bagian dalam struktur Organisasi Sekretariat Daerah diantaranya : Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama.

c. *Program Perekonomian Dan Pembangunan*

Program Perekonomian dan pembangunan dilaksanakan dibawah kendali asisten perekonomian dan pembangunan yang bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam. Program ini diampu oleh 4 bagian diantaranya bagian pembangunan, bagian ekonomi, bagian Pengadaan Barang/Jasa dan bagian sumber daya alam.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target tertentu sangatlah diperlukan. Besar kecilnya anggaran yang diperlukan tergantung pada seberapa besar fungsi yang dilaksanakan oleh suatu SKPD. Jika anggaran tersedia secara memadai maka target yang ingin dicapai untuk mewujudkan indikator tertentu akan cenderung tercapai. Sebaliknya jika anggaran tidak tersedia secara memadai maka akan sulit untuk mencapai target yang diharapkan.

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2021 adalah faktor sumber daya manusia. Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Koordinasi antar seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Hingga semester 1 tahun 2021 program Penunjang urusan pemerintah daerah telah terlaksana dengan kisaran capaian kinerja di angka 30% hal ini diantaranya pelaksanaan pembiayaan rutin kantor, pelaksanaan protokoler pimpinan serta penyediaan gaji ASN dan non ASN dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semester I tahun 2021 masih berkisar dibawah 20 %, hal yama terjadi juga pada program perekonomian dan pembangunan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara umum tidak terdapat program yang terlaksana sesuai target capaian yang telah ditetapkan, rata rata target capaian yang ditetapkan di semester I tahun 2021 adalah 50% dan realisasi capaian yang dihasilkan rata rata diangka 30 s/d 40 % , hal ini disebabkan penyesuaian terhadap skema pembiaayaan yang

diterapkan oleh BPKAD, dimana tahapan pembiayaan yang di alokasikan untuk semester I dibatasi hanya 40% dari alokasi anggaran dalam 1 tahun, sehingga kondisi tersebut turut mempengaruhi capaian kinerja yang dapat terlaksana.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara umum realisasi Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2021 berkisar diangka 30 % s/d 40 % dan tidak terdapat program ataupun kegiatan yang melampaui target yang ditetapkan akibat ketersediaan anggaran kegiatan yang tidak sesuai rencana. Kekhawatiran terjadinya kegiatan terhutang seperti di tahun 2018 menjadikan para pelaksana kegiatan sangat berhati hati dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan. Harapanya kepastian ketersediaan anggaran segera disampaikan oleh instansi terkait, agar program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun penganggaran.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor lain yang diyakini turut berpengaruh terhadap menurunnya realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pada tahun 2021 adalah faktor sumber daya manusia. Sekretariat daerah merupakan salah satu OPD dengan jumlah ASN terbesar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, namun banyaknya pegawai tersebut tidak ditunjang dengan kompetensi dan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pernakat daerah tersebut sehingga yang terjadi adalah beban pembiayaan yang besara atas gaji dan tunjangan namun tidak sebanding dengan output yang dihasilkan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra_PD;

Secara umum capaian program Renstra PD masih dalam batas wajar. Keberhasilan pencapaian target kinerja pelayanan dapat dirasakan oleh masyarakat, namun kondisi akan mendapatkan tantangan dimasa yang akan datang. Dimana fenomena perubahan aturan dan ketentuan yang terapkan oleh pemerintah pusat, serta tatangan terhadap rencana perpindahan IKN ke provinsi kalimantan timur yang pasti akan membawa perubahan besar disegala bidang terutama bidang pemerintahan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Strategi dan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial disusun sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial. Kebijakan tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam langkah kerja operasional berupa program-program pelayanan maupun program penunjang pelayanan kepada kelompok sasaran. Dalam menentukan program pelayanan setidaknya ada 2 (dua) instrumen yang harus dipedomani yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta aturan perubahannya dan program prioritas nasional

Setiap program kemudian dijabarkan dalam beberapa kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai indikator program. Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja manfaat (*outcome*) sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan indikator kinerja keluaran (*output*). Indikator *outcome* bisa diperoleh jika indikator *output* dari masing-masing kegiatan dapat berfungsi. Sedangkan indikator *output* merupakan indikator yang dihasilkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. Diantara indikator *output*, *outcome* dan indikator kinerja sasaran memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Berdasarkan hasil rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja_PD Tahun 2021 hingga semester Pertama secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Semester I 2021 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Satuan	Vol	Capaian Fisik Sem I	Status Pelaksanaan			Permasalahan	
						Kategori	Persentase	Keterangan	Kategori	Keterangan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Aparatur / Orang	6,00	1,00	Pelaksanaan	55,00%	pematangan pembinaan Camat dan PADU DESK di beberapa Kelurahan dan desa penjadwalan Ulang Rapat Pelimpahan kewenangan finalisasi PERDA pemetaan urusan	Pimpinan lambat respon, Pelaksanaan terkendala batas kewenangan, Lokasi bertambah/berkurang	belum ada PD yang melimpahkan kewenangannya perlunya evaluasi pembagian SPD per sub kegiatan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kasus	12,00	1,00	Pelaksanaan	55,00%	fasilitasi penanganan masalah bidang Pemerintahan fasilitasi Batas Daerah Fasilitasi Batas Kecamatan dan Desa	Lokasi bertambah/berkurang	- perlunya koreksi terhadap SPD untuk mendukung beberapa kegiatan - perlunya koordinasi antar Bagian dan PD dalam fasilitasi penanganan permasalahan berdasarkan tupoksi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen / Laporan	3,00	0,00	Selesai	100,00 %	- menunggu proses evaluasi dan penilaian. - perlunya peningkatan kapasitas tim penyusun LPPD dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan.	Pelaksanaan terkendala regulasi, Pelaksanaan terkendala batas kewenangan, Lokasi bertambah/berkurang	- kurangnya pemahaman anggota tim penyusun karena regulasi dan sistem pelaporan melalui web aplikasi yang baru. - kurangnya koordinasi antar tim penyusun dan Tim APIP (Review) - masih ada beberapa penyesuaian IKK terhadap 2 regulasi (PP 13 /2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) - belum adanya sosialisasi dari Kemendagri dan Provinsi - kurangnya koordinasi antar PD yang berkaitan dg IKK output - perlunya Bimtek terkait masing-masing IKK - perlunya koreksi terhadap SPD untuk mendukung beberapa kegiatan

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Perbub	30,00	0,00	Perencanaan	5,00%	belum ada penagihan dan SPJ	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	belum ada penagihan dan SPJ
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Peraturan	10,00	0,00	Perencanaan	5,00%	belum ada penagihan dan SPJ	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	belum ada penagihan dan SPJ
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	SK	500,00	0,00	Perencanaan	5,00%	belum ada penagihan dan SPJ	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	belum ada penagihan dan SPJ
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Perdes	10,00	0,00	Perencanaan	5,00%	belum ada penagihan dan SPJ	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	belum ada penagihan dan SPJ
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus/Perkara	6,00	0,00	Persiapan	15,00%	belum ada penagihan dan SPJ	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	belum ada penagihan dan SPJ
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	dokumen	4,00	0,00	Perencanaan	5,00%	belum ada penagihan dan SPJ	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	belum ada penagihan dan SPJ
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	website	1,00	0,00	Persiapan	15,00%	belum ada penagihan dan SPJ	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	belum ada penagihan dan SPJ
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	orang/hari/kegiatan	45,00	0,00	Pelaksanaan	27,00%	belum ada penagihan dan SPJ	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	belum ada penagihan dan SPJ
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kerjasama	12,00	1,00	Pelaksanaan	30,00%	1. Penandatanganan Kerjasama Kukar- BPJS Ketenagakerjaan 2. Fasilitasi penyusunan naskah kerjasama : a. PKK Kukar b. Geo Trash Manajemen (penganganan sampah plastik) c. STPN Yogyakarta	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	menunggu SPD berikut dan fasilitasi penyusunan naskah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Mou/Jaringan	1,00	0,00	Pelaksanaan	26,00%	Melaksanakan kegiatan berupa koordinasi dengan pihak terkait	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Anggaran pada SPD kurang
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	8,00	0,00	Pelaksanaan	26,00%	Pembuatan Pelaporan kerjasama yang sudah dilaksanakan	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Anggran pada SPD kurang

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dai	50,00	0,00	Pelaksanaan	35,00%	1. Survey dan sosialisasi ke kecamatan 2. Penjaringan, penyaringan dan seleksi peserta 3. Lounching Da'i Masuk Desa 4. Pelatihan Da'i Masuk Desa	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	1. Survey dan sosialisasi belum terlaksana 2. Penjaringan, penyaringan dan seleksi peserta belum terlaksana 3. Lounching dan pelatihan Da'i Masuk desa belum terlaksana
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi	1,00	0,00	Pelaksanaan	50,00%	bahwa kegiatan terhenti karena pengiriman jamaah haji Indonesia tidak dilaksanakan tahun ini	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	bahwa kegiatan terhenti karena pengiriman jamaah haji Indonesia tidak dilaksanakan tahun ini
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Ekor	26,00	0,00	Pelaksanaan	50,00%	1. melanjutkan persiapan pelelangan 2. melanjutkan survey lapangan	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	kegiatan kegiatan terkendala dikarenakan dengan wabah covid-19
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan	18,00	0,00	Pelaksanaan	35,00%	Pelaksanaan monitoring Pertanggungjawaban Laporan (LPj) Hibah dan Bantuan Sosial Keagamaan Kab. Kutai Kartanegara	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	pelaksanaan monitoring terkendala dengan wabah covid-19, sehingga belum terlaksana
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kegiatan	11,00	0,00	Pelaksanaan	30,00%	Bulan Juni tidak ada peringatan hari besar keagamaan	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Bulan Juni tidak ada kegiatan hari besar keagamaan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Orang	500,00	0,00	Pelaksanaan	26,00%	Verifikasi dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Verifikasi dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Orang	110,00	0,00	Pelaksanaan	79,00%	Mengikuti Pelaksanaan MTQ di Bontang	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Mengikuti Pelaksanaan MTQ di Bontang
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan	18,00	0,00	Pelaksanaan	26,00%	Lanjutan kegiatan safari subuh terhenti karena terkendala dengan wabah covid-19	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Lanjutan kegiatan safari subuh terhenti karena terkendala dengan wabah covid-19
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan	18,00	0,00	DPPA	0,00%	Kegiatan belum di jalankan karna anggarannya belum keluar	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Anggarannya di Perubahan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan	4,00	0,00	DPPA	0,00%	Kegiatan belum di jalankan karna anggarannya belum keluar	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Anggarannya di Perubahan

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kali/even	1,00	0,00	DPPA	0,00%	Kegiatan belum di jalankan karna anggarannya belum keluar	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Anggarannya di Perubahan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Berkas	73,00	0,00	Pelaksanaan	70,00%	Pencairan mulai dilaksanakan	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Pencairan mulai dilaksanakan
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kecamatan	18,00	0,00	DPPA	0,00%	Rencana Akan Di Anggarkan Tahun Depan Di Tahun 2022	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Rencana Akan Di Anggarkan Tahun Depan Di Tahun 2022
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Raperbup	1,00	0,00	DPPA	0,00%	Rencana Akan Di Anggarkan Tahun Depan Di Tahun 2022	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Rencana Akan Di Anggarkan Tahun Depan Di Tahun 2022
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Raperda	1,00	0,00	DPPA	0,00%	Kegiatan belum di jalankan karna anggarannya belum keluar	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Anggarannya tidak ada di Tahun ini
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rumah Ibadah	14,00	0,00	Pelaksanaan	40,00%	Mulai Pencairan Dana Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Banyaknya Permintaan Bantuan Rumah Ibadah
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kecamatan	18,00	0,00	Pelaksanaan	60,00%	Melaksanakan Kegiatan Monitoring Bantuan Korban Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Kab. Kukar	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Melaksanakan Kegiatan Monitoring Bantuan Korban Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Kab. Kukar
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kegiatan	1,00	0,00	Selesai	100,00 %	Pelaksanaan Kegiatan Merah Putih Sanga-Sanga	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Pelaksanaan Kegiatan Merah Putih Sanga-Sanga
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Asrama	14,00	0,00	Pelaksanaan	60,00%	Persiapan Kontrak Asrama Mahasiswa dan Pelajar Putri Kab. Kutai Kartanegara di Yogyakarta	Waktu pelaksanaan kurang	Persiapan Kontrak Asrama Mahasiswa dan Pelajar Putri Kab. Kutai Kartanegara di Yogyakarta
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Bagian	12,00	0,00	Pelaksanaan	30,00%	Fasilitasi Senam Sekretariat setiap Jum'at pagi	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Fasilitasi Senam Sekretariat setiap Jum'at pagi

	Rakyat	terkait Kesejahteraan Masyarakat								
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Perbup	1,00	0,00	Pelaksanaan	60,00%	Rapat koordinasi Rencana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Peraturan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Rapat koordinasi Rencana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Peraturan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kecamatan	18,00	0,00	Pelaksanaan	26,00%	Monitoring TP UKS Kecamatan	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Tidak teranggarkan Rakerda UKS
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Orang	20,00	0,00	Persiapan	15,00%	Pembahasan Rancangan Perbup. Kukar Idaman	Pelaksanaan terkendala regulasi	Pembahasan Rancangan Perbup. Kukar Idaman
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Orang	200,00	0,00	Persiapan	15,00%	Pembahasan draf Perbup Beasiswa Kukar Idaman	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Pembahasan draf Perbup Beasiswa Kukar Idaman
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Orang	800,00	0,00	Persiapan	25,00%	Pembahasan draf Perbup Beasiswa Kukar Idaman	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Pembahasan draf Perbup Beasiswa Kukar Idaman
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Orang	200,00	0,00	Persiapan	15,00%	Pembahasan draf Perbup Beasiswa Kukar Idaman	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Pembahasan draf Perbup Beasiswa Kukar Idaman
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Orang	20,00	0,00	Persiapan	15,00%	Pembahasan draf Perbup Beasiswa Kukar Idaman	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Pembahasan draf Perbup Beasiswa Kukar Idaman
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Bankeu)	pondok pesantren	1,00	0,00	Perencanaan	10,00%	Belum di Masuk Bengkeu	Lokasi tidak tersedia	Belum di Masuk Bengkeu

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Perusda	1,00	0,00	Persiapan	20,00%	Penyusunan Tim Evaluasi Kinerja	SK terlambat	Masih proses koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan dari BPKP Perwakilan Prop. Kaltim
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kecamatan	18,00	3,00	Pelaksanaan	35,00%	Menunggu SPD lanjut dan Koordinasi pelaksanaan perjalanan dinas selanjutnya.	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan	kegiatan terkendala dengan adanya Surat Edaran Bupati tentang Wabah Covid 19 PPKM level 4
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Layanan	35,00	0,00	Persiapan	15,00%	Menunggu terbitnya SPD Koordinasi ke Dinas/Instansi terkait	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan	Adanya Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tentang PPKM Level 4 Terkait Covid 19
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Raperbup	1,00	0,00		0,00%			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kecamatan	10,00	0,00	Pelaksanaan	30,00%	Membuat Permintaan Personil ke Dinas Intansi Terkait, untuk kelapangan melakukan pengawasan.	Pelaksanaan terkendala regulasi	Adanya Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara tentang Covid 19
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kecamatan	9,00	0,00	Pelaksanaan	30,00%	Membuat Permintaan Personil ke BPOM, Perindag Kependidikan, Satpol PP, Humas, Ketahanan pangan, Dinkes, untuk Sidak Membuat Surat Tugas dan SPPD utk sidak	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	dana kegiatan atau SP2D masih dalam proses
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rakor	1,00	0,00	Pelaksanaan	30,00%	Persiapan kegiatan koordinasi ke Kecamatan dan konsultasi ke Propinsi	Pelaksanaan terkendala regulasi	adanya surat edaran bupati tentang wabah covid 19
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kecamatan	9,00	0,00		0,00%			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Rakor	42,00	0,00	Pelaksanaan	40,00%	Mengikuti kegiatan Rapat-rapat Koordinasi	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan	adanya surat Edaran Bupati Tentang Wabah Covid 19 untuk WFH

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kecamatan	18,00	0,00	Pelaksanaan	35,00%	Proses adminstrasi Kegiatan untuk melakukan kegiata ke Lapangan/kecamatan	Pelaksanaan terkendala batas kewenangan	adanya surat edaran bupati tentang Covid 19 (WFH)
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Rakor	6,00	0,00	DPPA	0,00%	belum adanya kegiatan fasilitasi dan Koordinasi Tim Percepatan Akses Kuangan Daerah (TPKAD) Kab. Kukar di anggaran 2021	Pelaksanaan terkendala regulasi	karena kegiatan TPKAD Kab. Kukar tersebut baru akan dilaksanakan di Tahun 2022
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	laporan	18,00	6,00	Pelaksanaan	55,00%	Pelaksanaan pendampingan Musrenbang di 18 kecamatan	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Pelaksanaan pendampingan Musrenbang di 18 kecamatan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Regulasi	1,00	0,00		0,00%			
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	7,00	0,00	Pelaksanaan	60,00%	1. koordinasi dan konsultasi Optimisasi Pengelolaan dan Penggunaan dana perimbangan dan pembiayaan Pembangunan Daerah di Jakarta 2. Menghadiri undanbgan rapat tentang perbaikan Nomenklatur daftar Kegiatan bankeu Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2021 3. pengajuan dan validasi anggaran pergeseran	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Lokasi Kegiatan bertambah dari yang telah di rencanakan karena disesuaikan dengan laporan masyarakat / OPD / Instansi Terkait yang memang perlu untuk di tinjau sesuai arahan dari atasan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Aplikasi	1,00	0,00	Pelaksanaan	35,00%	1. Rapat Mekanisme Pengelolaan dana Bantuan Keuangan dari provinsi ke Kabupaten / Kota Se - Kalimantan Timur 2. pengajuan dan spj GU kegiatan pelaporan 3. pengajuan dan validasi anggaran pergeseran	Anggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi	Kegiatan yang di rencanakan sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	1,00	0,00	DPPA	0,00%	perubahan output sub kegiatan	Anggaran Kurang Terhadap Target Output,Salah Dalam Penyusunan Alokasi	Kegiatan yang direncanakan sebelumnya tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan dikarenakan ada perubahan kebijakan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	paket	183,00	0,00	Perencanaan	1,00%	adanya penundaan kegiatan	Salah Dalam Penyusunan Alokasi	Pergeseran Anggaran KAS

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	OPD	158,00	0,00	Pelaksanaan	55,00%	Proses Paket Pekerjaan Konstruksi/Konsultasi	Penerima manfaat bertambah/berkurang	Proses Paket Pekerjaan Konstruksi/Konsultasi
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	OPD	58,00	5,00	Perencanaan	1,00%	Kegiatan belum bisa di SPJ karena Anggaran Kas	Salah Dalam Penyusunan Alokasi	Permohonan pergeseran anggaran kas masih di proses
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Website	1,00	0,00	Pelaksanaan	99,00%	Pembangunan website UKPBJ	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Pembangunan website UKPBJ
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Aplikasi	1,00	0,00	Dimanfaatkan	100,00 %	Pengelolaan aplikasi SPSE dari LKPP	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Pengelolaan aplikasi SPSE dari LKPP
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan	3,00	3,00	Pelaksanaan	65,00%	- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - terbitnya SPPBJ - Penandatanganan Kontrak - Menginput E-Kontrak kedalam sistem LPSE	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	- Sudah terdapat penyedia Barang/jasa sesuai dengan hasil proses pengadaan langsung
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	OPD	58,00	1,00	Pelaksanaan	50,00%	Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	- Sesuai Jadwal yang ditetapkan
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	50,00	0,00	Pelaksanaan	45,00%	- Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait pelaksanaan Bimtek - Melakukan Koordinasi teknis pelaksanaan Bimtek	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	- sesuai dengan jadwal yang disepakati
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	50,00	0,00	Pelaksanaan	26,00%	pembayaran honorarium PPTK, Bedahara Pengeluaran Pembantu	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	pembayaran honorarium PPTK, Bedahara Pengeluaran Pembantu
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rapat/Ko nsultasi	15,00	1,00	Pelaksanaan	45,00%	Rapat Koordinasi terkait pembahasan permasalahan di Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Belum ada SPD Triwulan III
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Rekomen dasi	6,00	1,00	Pelaksanaan	30,00%	Koordinasi dan Tinjau lapangan ke Kecamatan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, Kebijakan	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Tidak ada permasalahan di lapangan dalam Koordinasi dan Tinjau lapangan ke Kecamatan

								Pertambahan dan Lingkungan Hidup		
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rekomen dasi	6,00	1,00	Pelaksanaan	30,00%	Koordinasi dan Konsultasi Menghimpun Informasi/ Data kelapangan ke Kecamatan Muara Wis terkait Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi, Kebijakan Energi dan Air	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Untuk Menghimpun Informasi/ Data Tidak ada permasalahan di lapangan dalam Koordinasi dan Konsultasi kelapangan ke Kecamatan Muara Wis
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	2,00	0,00	Pelaksanaan	35,00%	Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan, Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Terhambat nya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja	2,00	0,00	Pelaksanaan	65,00%	Tahapan Penginputan Perbaikan Indikator E-RPJMD dan SIPD	Waktu pelaksanaan kurang	Menyesuaikan jadwal Bappeda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1,00	0,00	Persiapan	16,00%	persiapan pelaksanaan kegiatan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	tidak masuk dalam SPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12,00	0,00	Persiapan	25,00%	persiapan pelaksanaan kegiatan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	tidak masuk dalam SPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	80,00	0,00	Persiapan	15,00%	Verifikasi usulan penusunan RKBMD.	Penerima manfaat bertambah/berkurang	Kebutuhan barang milik daerah disesuaikan dengan anggaran dan tingkat kewajaran.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	laporan	1,00	0,00	Perencanaan	1,00%	Persiapan bahan / data kendaraan yang akan dilakukan pengamanan / penarikan.	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Anggaran pelaksanaan kelapangan belum tersedia pada anggaran kas.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Data	1,00	0,00	Perencanaan	1,00%	Penyiapan data fisik tanah.	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Belum tersedia anggaran pelaksanaan kelengkapan.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1,00	0,00	Perencanaan	10,00%	Proses olah data (Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Serah terima Barang dan proses pembuatan pembukuan yang lainnya).	Penerima manfaat bertambah/berkurang	Proses pengumpulan bahan sebagai laporan pada 12 Bagian Lingkup Sekretariat Kab. Kutai Kartanegara.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Unit	100,00	2,00	Pelaksanaan	30,00%	Proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengangkutan dan penataan Barang Hasil Pengadaan yang Ada dan Yang Akan Diadakan Serta Barang Barang Purna Pakai.	Penerima manfaat bertambah/berkurang	Penataan BMD disesuaikan dengan barang masuk dan keluar.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	1,00	0,00	Perencanaan	1,00%	Proses pendataan / pencarian data global pada Simda BMD.	Material sulit ditemukan di pasar	Proses pendataan / pencarian data global pada Simda BMD.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Unit	300,00	0,00	Persiapan	20,00%	Proses pembuatan data / daftar BMD diusul hapuskan.	Material sulit ditemukan di pasar	Terdapat beberapa barang yang sudah mengalami kerusakan dan fisik tidak ditemukan.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Unit	350,00	0,00	Perencanaan	10,00%	Tahapan persiapan data kendaraan dinas roda empat dan dua (Proses pembuatan BA Pinjam Pakai).	Salah Dalam Penyusunan Alokasi	Pelaksanaan kelengkapan disesuaikan dengan anggaran tersedia.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Unit	1.000,00	0,00	Persiapan	15,00%	Proses pendataan pengguna / pemanfaat kendaraan dinas roda empat dan dua.	Material sulit ditemukan di pasar	masih terdapat data pengguna kendaraan dinas.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen	1,00	1,00	Persiapan	25,00%	Proses pendataan dan pembuatan BA Pinjam Pakai BMD Pada Masjid Agung Kec. Tenggarong.	Penerima manfaat tdk jelas/tdk dapat divalidasi	Disesuaikan dengan petugas Masjid Agung Kec. Tenggarong.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	1,00	0,00	Perencanaan	5,00%	Tahap pendataan lebih lanjut	Material sulit ditemukan di pasar	Tahap pendataan lebih lanjut
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	40,00	19,00	Pelaksanaan	35,00%	Proses Pendataan dan pengukuran pembuatan pakaian.	Waktu pelaksanaan kurang	Proses pembuatan / penyelesaian penjahitan pakaian dinas pejabat.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	laporan	1,00	0,00	Pelaksanaan	50,00%	Pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Terlambatnya Administrasi Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	261,00	30,00	Pelaksanaan	45,00%	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	porsi	34.360,00	2.850,00	Pelaksanaan	52,00%	-Pekerjaan sesuai kontrak sudah dilaksanakan -Pemenuhan Jamuan Makanan dan Minuman dilaksanakan sesuai permintaan	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Menunggu SPD terbit untuk melakukan proses tagihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Buah	51,00	10,00	Pelaksanaan	35,00%	Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Terlambat nya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	orang/Kali	2.367,00	30,00	Pelaksanaan	35,00%	Telah di laksanakan perjalanan dinas dan rekap perjalanan dinas pada kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Menunggu SPD Tri Wulan III untuk kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Berkas	634,00	30,00	Pelaksanaan	46,00%	1. Data arsip surat keluar / Per 17 Juni Tahun 2021 2. Rekap dan Arsip-arsip yang akan di pindah ke Record Center	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Terlambat nya administrasi Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	eksamplar	12.401,00	1.200,00	Pelaksanaan	56,00%	Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Masyarakat kabupaten Kutai Kartanegara	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Proses Ini Diharapkan Menghasilkan P3K Yang Berkualitas, Professional Dan Kreatif Serta Inovatif Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Untuk Kepentingan Pelayanan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	2,00	0,00	Perencanaan	1,00%	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dialihkan menjadi sewa kendaraan pejabat pada Anggaran Perubahan Tahun 2021.	Salah Dalam Penyusunan Alokasi	Anggaran dialihkan kesewa kendaraan pejabat pada anggaran perubahan Tahun 2021.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Stel	40,00	0,00	Perencanaan	10,00%	Proses pengukuran dan penjahitan pakaian dinas pejabat.	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Proses pengukuran dan pembuatan pakaian membutuhkan waktu yang relatif banyak.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	4,00	0,00	Persiapan	25,00%	Proses tandatangan kontrak / perjanjian kerja dengan penyedia.	Salah Dalam Penyusunan Alokasi	Disesuaikan dengan anggaran kas kegiatan.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4,00	0,00	Perencanaan	5,00%	Proses pelaksanaan kelengkapan kegiatan.	Salah Dalam Penyusunan Alokasi	Proses pengadaan disesuaikan dengan anggaran kas.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis	5,00	0,00	Perencanaan	5,00%	Proses pelaksanaan kelengkapan kegiatan.	Salah Dalam Penyusunan Alokasi	Disesuaikan dengan anggaran kas kegiatan.

KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintah Daerah									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12,00	1,00	Pelaksanaan	35,00%	Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rencana tdk sesuai dengan kondisi di lapangan,Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Terlambat administrasi Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12,00	1,00	Pelaksanaan	50,00%	Melaksanakan proses administrasi pembayaran Tagihan Rekening Air Bersih, Telepon/Speedy Internet, TV Kabel dan TV Satelit dan Rekening Listrik setiap bulannya.	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	Progres pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang ditentukan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12,00	1,00	Pelaksanaan	50,00%	-Pekerjaan sesuai kontrak sudah dilaksanakan -Pemeliharaan kebersihan tetap dilaksanakan pada unit bangunan/gedung setiap bulan.	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	Progres Pekerjaan sesuai dengan target rencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12,00	0,00	Pelaksanaan	30,00%	Pembayaran Gaji THL Bulan Mei	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	Pelaksanaan Sesuai Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit/STN K	67,00	5,00	Pelaksanaan	50,00%	Melaksanakan proses administrasi perpanjangan perizinan kendaraan dinas/operasional sesuai permintaan	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Menunggu SPD berikutnya terbit untuk melakukan proses penagihan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	16,00	3,00	Pelaksanaan	50,00%	-Pekerjaan sesuai kontrak sudah dilaksanakan - Pemeliharaan bangunan gedung kantor & rumah jabatan dilaksanakan setiap bulannya	Salah Dalam Penyusunan Alokasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana	- Anggaran tidak terserap karena menyesuaikan posisi anggaran kas - Progres fisik pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	15,00	1,00	Pelaksanaan	38,00%	-Pekerjaan sesuai kontrak sudah dilaksanakan	Rencana tdk sesuai dengan keluaran yg diharapkan,Progres pelaksanaan sesuai target rencana	- Ketidaksesuaian volume kegiatan dalam sistem dengan DPA. Volume dalam DPA adalah 60.000 m2 - Progres fisik telah dilaksanakan sesuai target rencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	340,00	20,00	Pelaksanaan	50,00%	- Pekerjaan sesuai kontrak sudah dilaksanakan - Pemeliharaan / perawatan peralatan di lingkungan gedung kantor dan rumah jabatan tetap dilaksanakan setiap bulan sesuai permintaan perbaikan/perawatan	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	Progres fisik pekerjaan dilaksanakan sesuai target rencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	dokumen	3,00	1,00	Pelaksanaan	60,00%	1. Penetapan SK Bupati tentang Anjab dan ABK. 2. Penetapan kebutuhan formasi STAN.	SDM tidak sesuai kualifikasi,Progres pelaksanaan sesuai target rencana	SDM/Pelaksana yang ada tidak sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diampu, sehingga tidak bisa dan paham dalam melaksanakan tugas jabatan serta melaksanakan tugas sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rancangan Peraturan Bupati	34,00	0,00	Pelaksanaan	50,00%	Pengusulan penyederhanaan struktur organisasi.	SDM tidak sesuai kualifikasi,Pelaksanaan terkendala regulasi	1. Pedoman Regulasi yang berubah-ubah dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat dan provinsi; 2. SDM/Pelaksana yang ada tidak sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diampu, sehingga tidak bisa dan paham dalam melaksanakan tugas jabatan serta melaksanakan tugas sesuai dengan target kinerja yang sudah ditetapkan.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	4,00	2,00	Pelaksanaan	30,00%	Sosialisasi Tatacara Penilaian, Penyusunan Proposal Inovasi dan Dokumen Indikator Penilaian	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan	2,00	0,00	Pelaksanaan	80,00%	Proses Sosialisasi telah dilaksanakan, pengisian matrik telah dilakukan sebagian besar perangkat daerah, penentuan opd sampling PMPRB telah dilaksanakan	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	Proses reviu telah dilaksanakan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2,00	0,00	Pelaksanaan	60,00%	Persiapan perumusan perkada terkait SAKIP	SK terlambat,Progres pelaksanaan sesuai target rencana	Progres pelaksanaan telah sesuai, hanya SK belum selesai
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Aplikasi	2,00	0,00		0,00%			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Kegiatan	8,00	50,00	Pelaksanaan	30,00%	keprotokolan pelayanan terhadap tamu dan pelayanan penanganan acara resmi Pemerintah Daerah kabupaten kutaikartanegara	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	keprotokolan pelayanan terhadap tamu dan pelayanan penanganan acara resmi Pemerintah Daerah kabupaten kutaikartanegara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	SPT	650,00	50,00	Pelaksanaan	35,00%	Peninjauan beberapa demplot pertanian dalam rangka mempersiapkan Kukar sebagai tuan rumah Rembuk KTNA Nasional yang tentunya sesuai penetapan tuan rumah oleh Pemerintah pusat,	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Peninjauan beberapa demplot pertanian dalam rangka mempersiapkan Kukar sebagai tuan rumah Rembuk KTNA Nasional yang tentunya sesuai penetapan tuan rumah oleh Pemerintah pusat,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	buku	1.000,00	80,00	Pelaksanaan	50,00%	Melakukan monitoring kondisi dan masa tayang dan melakukan pergantian informasi sesuai perencanaan	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Melakukan monitoring kondisi dan masa tayang dan melakukan pergantian informasi sesuai perencanaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	dokumen	100,00	5,00	Pelaksanaan	66,00%	Dokumen PPID dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Jumlah Dokumen PPID dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Media	9,00	50,00	Pelaksanaan	30,00%	Pelaksanaan Publikasi Event daerah melalui media cetak dan online ini melalui media cetak surat kabar harian daerah merupakan salah satu bentuk membangun, mengembangkan kemitraan terhadap media dan publikasi yang dinamis.	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Pelaksanaan Publikasi Event daerah melalui media cetak dan online ini melalui media cetak surat kabar harian daerah merupakan salah satu bentuk membangun, mengembangkan kemitraan terhadap media dan publikasi yang dinamis.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pertayang	1.550,00	100,00	Pelaksanaan	35,00%	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan webside Protokol dan komunikasi Pimpinan berupa Artikel	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	erlaksananya kegiatan Pengelolaan webside Protokol dan komunikasi Pimpinan berupa Artikel
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	hari/halaman	315,00	30,00	Pelaksanaan	60,00%	Berdasarkan dengan Visi Misi Kukar Idaman 2021 – 2026 yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia,	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Menciptakan pelayanan kehumasan yang efektif serta publikasi kebijakan pemerintah daerah yang cepat dan akurat melalui media on-line
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pameran	1,00	0,00	Persiapan	11,00%	Rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Rencana tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kali	355,00	30,00	Pelaksanaan	60,00%	Pendokumentasi dan peliputan kegiatan pimpinan	Anggaran Kurang Terhadap Target Output	Pendokumentasi dan peliputan kegiatan pimpinan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	M2	3.091,00	128,00	Pelaksanaan	50,00%	Pemasangan baliho dalam acara maupun peringatan, ucapan-ucapan tentang keberhasilan Pembangunan yang telah di capai oleh Pemerintah Kabupaten kutai kartanegara di berbagai tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat.	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Pemasangan baliho dalam acara maupun peringatan, ucapan-ucapan tentang keberhasilan Pembangunan yang telah di capai oleh Pemerintah Kabupaten kutai kartanegara
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Berita Liputan	1.168,00	90,00	Pelaksanaan	26,00%	Informasi berkaitan dengan kegiatan dokumentasi dan peliputan kegiatan pimpinan	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	Informasi berkaitan dengan kegiatan dokumentasi dan peliputan kegiatan pimpinan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Video Liputan	689,00	50,00	Pelaksanaan	26,00%	menetapkan produk yang sesuai dengan program-program yang positif akan disiarkan dan dilihat masyarakat luas.	Waktu pengurusan SPD/SP2D tdk sesuai waktu pemenuhan barang/jasa	menetapkan produk yang sesuai dengan program-program yang positif akan disiarkan dan dilihat masyarakat luas.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	634,00	0,00	Pelaksanaan	80,00%	Pembayaran Gaji PNS Bulan Mei	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	Pelaksanaan Sesuai dengan Target

KABUPATEN/KOTA										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	4,00	1,00	Persiapan	14,00%	Pelaksanaan Kegiatan yang akan dijalankan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Tidak masuk dalam usulan SPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4,00	1,00	Persiapan	25,00%	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Tidak masuk dalam usulan SPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	paket	12,00	0,00	Persiapan	18,00%	Proses persiapan kegiatan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Tidak masuk dalam SPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	12,00	0,00	Persiapan	20,00%	Proses pengumpulan data dan realisasi belanja untuk persiapan pembuatan laporan Prognosis Semester Pertama	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Proses pengumpulan data dan realisasi belanja untuk persiapan pembuatan laporan Prognosis Semester Pertama
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Dokumen	1,00	0,00	Persiapan	12,00%	Persiapan pelaksanaan kegiatan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Tidak masuk dalam usulan SPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Dokumen Laporan Bulanan	5,00	0,00	Persiapan	14,00%	Persiapan Pelaksanaan Kegiatan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Tidak masuk dalam SPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	dokumen laporan bulanan	12,00	1,00	Persiapan	15,00%	Persipan pelaksanaan Kegiatan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Tidak masuk dalam usulan SPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	dokumen	11,00	0,00	Persiapan	15,00%	Pelaksanaan dalam kegiatan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Tidak masuk dalam usulan SPD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	dokumen	2,00	0,00	Persiapan	20,00%	Pelaksanaan dalam kegiatan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Tidak masuk dalam usulan SPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	dokumen	1,00	0,00	Pelaksanaan	30,00%	Sesuai target pelaksanaan	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	Sesuai target pelaksanaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	2,00	0,00	Persiapan	13,00%	Persiapan pelaksanaan kegiatan	waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana	Tidak masuk dalam usulan SPD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2,00	0,00	Pelaksanaan	60,00%	Pembayaran Gaji Kepala Daerah Bulan Mei	Progres pelaksanaan sesuai target rencana	Pembayaran Sesuai Rencana
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2,00	0,00		0,00%			

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan APBD Tahun 2021
Semester I

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/Keg iatan /Renstra OPD	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (APBD 2021)	Indikator	Target Kinerja Capaian Tahun 2021		Realisasi Target Kinerja		Target dan Realisasi Pagu Tahun Berjalan (2021)			Ket
			K		K	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi (%)	
Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2	Dokumen	0	0%	140.880.000	0	0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pencapaian Kinerja pada Bagian Perlengkapan	2	Dokumen	2	100%	23.940.000	0	0%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	12	Dokumen	12	100%	190.880.000	0	0%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	634	ASN	634	100%	60.143.036.346	31.572.405.344	52%	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Keuangan	4	Dokumen Belanja Langsung	4	100%	176.764.400	0	0%	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Aparatur yang memahami Penatausahaan Keuangan	12	Orang	12	100%	195.440.000	0	0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Kas dan Peserta Rekonsiliasi	12	Dokumen Rekonsiliasi	12	100%	77.380.000	0	0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan	1	Dokumen	1	100%	173.320.000	0	0%	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Realisasi Belanja 12 Bagian Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	2	100%	72.380.000	0	0%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	80	Buku	80	100%	140.880.000	1.500.000	1%	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang Inventaris hasil pengadaan Bagian Umum yang berada pada Gudang Setkab Kutai Kartanegara	200	Unit	200	100%	55.960.000	0	0%	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah data serta fisik tanah milik Pemerintah	1	Data	1	100%	54.920.000	0	0%	

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	100%	92.380.000	0	0%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang hasil pengadaan yang ada dan yang akan diadakan serta barang purna pakai	1000	Unit	1000	100%	450.450.000	0	0%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda									
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	2	Unit	2	100%	1.492.124.000	0	0%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Unit	100	100%	625.526.950	0	0%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen	7000	Surat	7000	100%	38.940.000	0	0%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	317	Rekening	317	100%	6.981.040.000	2.671.361.949	38%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	261	Item	261	100%	2.865.364.800	754.284.350	26%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkntoran pada Sekretariat Daerah	298	Orang	298	100%	5.826.879.384	2.285.570.679	39%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang Dikelola dan Validasi	634	ASN	634	100%	38.940.000	0	0%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	40	Setll	40	100%	188.140.180	0	0%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	261	Item	261	100%	1.099.317.800	199.352.785	18%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan	51	Jenis	51	100%	207.646.900	0	0%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	2367	Orang/Hari	2367	100%	990.340.000	0	0%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip	634	ASN	634	100%	250.290.000	0	0%	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	34360	Porsi	34360	100%	2.791.409.390	448.015.975	16%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	12401	Eksampler	12401	100%	93.007.500	22.050.000	24%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	317	Rekening	317	100%	785.404.488	154.239.800	20%	

	Pemeliharaan/Rhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rhabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16	Unit	16	100%	3.642.680.830	0	0%	
	Pemeliharaan/Rhabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6000	M2	6000	100%	1.447.170.340	0	0%	
	Pemeliharaan/Rhabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	340	Unit	340	100%	842.517.380	148.830.000	18%	
	Penataan Organisasi									
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Evaluasi	1	Dokumen	1	100%	537.760.000	14.290.000	3%	
		Jumlah Evaluasi	34	Raperbup	34	100%				
		Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1	100%				
		Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1	100%				
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan	58	Laporan	58	100%	389.320.000	0	0%	
		Jumlah Evaluasi	25	Laporan	25	100%				
		Jumlah Dokumen	1	Dokumen	1	100%				
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan RB	2	Dokumen	2	100%	2.682.820.000	9.460.000	0%	
		Jumlah ASN	600	ASN	600	100%				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen dan Aplikasi	4	Dokumen/Aplikasi	4	100%	190.880.000	10.615.000	6%	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara	9	Kali	9	100%	7.218.922.500	65.320.000	1%	
		Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara	315	hari/halaman	315	100%				
		Jumlah Dokumen PPD	100	Buah	100	100%				
		Jumlah data informasi daerah yang ada	1000	Buku	1000	100%				
		Jumlah Pengelolaan webside Protokol dan komunikasi publik	1550	pertayang	1550	100%				
	Fasilitasi Keprotokolan	Pengelompokan Fasilitasi Keprotokolan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun	1	Kegiatan	1	100%	5.868.672.815	326.675.060	6%	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pameran Merah Putih Sanga-Sanga	1	Kegiatan	1	100%	1.042.540.000	206.032.000	20%	
		Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan tentative Pemkab	354	Kali	354	100%				
		Media Cetak dan Display Informasi	3091	M2	3091	100%				
		Pengelolaan hasil Fotografi melalui e-paper	1168	Berita Liputan	1168	100%				
		Pengelolaan hasil videografi melalui tv kabel	689	video Liputan	689	100%				
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									

0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Bupati dan Wakil Bupati	2	100%			0%	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						-	0		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
	Administrasi Tata Pemerintahan									
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Aparatur	6	Orang	6	100%	239.680.000	11.754.800	5%	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	12	Kasus	12	100%	523.122.245	24.460.400	5%	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	3	100%	450.070.000	26.599.000	6%	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat								
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dai	50	Dai	100	200%	5.081.934.800	362.691.600	7%	
		Jumlah Fasilitasi	1	Fasilitasi	0	0%				
		Jumlah Hewan Qurban	26	Ekor	78	300%				
		Jumlah Pelaksanaan FKUB seKabupaten Kutai Kartanegara	18	Kecamatan	0	0%				
		Jumlah Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	11	Kegiatan	3	27%				
		Jumlah Jama'ah haji	500	Orang	1	0%				
		Jumlah Peserta MTQ Provinsi	110	Orang	110	100%				
		Pelaksanaan Safari Ramadhan/ Syawal (Masjid Kab. Kukar)	18	Kecamatan	18	100%				
		Fasilitasi Kegiatan Pusaka Sakinah Kabupaten Kutai Kartanegara	18	Kecamatan	18	100%				
		Fasilitasi Kegiatan Fardu Kifayah Kabupaten Kutai Kartanegara	4	Kecamatan	4	100%				
		Fasilitasi Kegiatan Seleksi Capim Basnas Kukar	1	Kali/even	1	100%				
		Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bansos Bidang Keagamaan	73	Berkas	73	100%				
		Jumlah kecamatan yang difasilitasi dan diberikan pembinaan terkait kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	18	Kecamatan	18	100%				
		Jumlah Raperbup yang terkait pengembangan kualitas pendidikan di pesantren	1	Raperbup	0	0%				
		Jumlah Raperda tentang Gema	1	Raperda	1	100%				
		Jumlah Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keagamaan Yang diverifikasi	14	Permohonan	0	0%				

	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kegiatan	1	Kegiatan	3	300%	156.760.000	13.790.000	9%	
		Bantuan tepat sasaran kepada korban bencana	18	Kecamatan	18	100%				
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kab Kukar	14	Asrama	28	200%	9.818.717.850	45.862.800	0%	
		Jumlah Fasilitas Olah Raga Sekretariat Daerah	12	Bagian	36	300%				
		Jumlah Rancangan Peraturan	1	Perbup	7	700%				
		Jumlah Sekolah Berprestasi	18	Kecamatan	18	100%				
		Jumlah Santri Penerima Beasiswa Kukar Idaman (Lanjut Perguruan Tinggi)	20	Orang	10	50%				
		Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Kukar Idaman (skema Tematik)	200	Orang	0	0%				
		Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Kukar Idaman (Stimulan S.1)	800	Orang	0	0%				
		Jumlah Penerima Beasiswa Kukar Idaman (Santri Pondok Pesantren)	200	Orang	0	0%				
		Jumlah Guru Non PNS Penerima Beasiswa Kukar Idaman	20	Orang	0	0%				
		Jumlah Penerima Beasiswa stimulan	2900	Orang	1255	43%				
		Jumlah Santri Penerima Beasiswa Kukar Idaman (Lanjut Perguruan Tinggi)	20	Orang	10	50%				
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Ketetapan Keputusan	500	SK	500	100%	487.958.000	0	0%	
		Jumlah Peraturan Desa	10	Perdes	10	100%				
		Jumlah Perbup	30	Peraturan Bupati	30	100%				
		Jumlah Raperda	10	Peraturan	10	100%				
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	4	Dokumen	2	50%	339.320.000	0	0%	
		Jumlah Penanganan Kasus/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	6	Perkara	5	83%				
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	45	Orang/Hari/Kegiatan	12	27%	165.880.000	0	0%	
		Jumlah Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	1	Website	1	100%				
	Fasilitasi Kerjasama Daerah									
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerja Sama	12	Kerja Sama	33	275%	240.880.000	23.930.000	10%	

	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama Luar Negeri	1	Kerja Sama	2	200%	297.054.000	0	0%	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Evaluasi Kinerja	8	Laporan	8	100%	240.880.000	33.928.000	14%	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	jumlah perusda yang dievaluasi	1	Prusda	4	400%	254.320.000	0	0%	
		Jumlah kecamatan yang dievaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi	18	Kecamatan	17	94%				
		Jumlah OPD dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara	35	Layanan	35	100%				
		Jumlah Raperbup	1	Dokumen	0	0%				
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	10	Kecamatan	8	80%	222.130.000	0	0%	
		Jumlah Objek Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahan berbahaya	9	Kecamatan	7	78%				
		Jumlah Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah	1	Rakor	1	100%				
		Jumlah Objek Pengawasan Distribusi BBM dan LPG bersubsidi	9	Kecamatan	0	0%				
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	42	Rakor	17	40%	138.380.000	0	0%	
		Jumlah Penyelesaian KUKP	18	Kecamatan	6	33%				
		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	6	Rakor	0	0%				
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan									
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Penyelesaian KUKP	18	Laporan	36	200%	170.880.000	0	0%	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan Monitoring dan Pengendalian	7	Laporan	7	100%	272.230.385	33.880.000	12%	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Aplikasi	1	Aplikasi	2	200%	149.970.000	0	0%	
		Jumlah Laporan	1	Laporan	0	0%				
		Jumlah monitoring laporan dan Evaluasi	4	Laporan	4	100%			0%	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa									
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Penunjang Kegiatan PBJ	183	Jumlah Paket	183	100%	492.590.000	0	0%	
		Pelaksanaan Inventarisasi Paket, Pelaksanaan Riset dan Analisis Pasar dan Melakukan Rapat Koordinasi dengan LKPP terkait Penyusunan dan Pengelolaan E-Katalog Lokal/ Sektoral	58	OPD	58	100%				

	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Aplikasi	1	Aplikasi	1	100%	289.320.000	0	0%	
		Jumlah OPD yang Dilayani	58	OPD	58	100%				
		Jumlah Website	1	Website	1	100%				
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Administrasi dan kebutuhan operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	3	Layanan	5	167%	506.910.000	0	0%	
		Jumlah OPD	58	OPD	58	100%				
		Jumlah Pokja, Pejabat Pengadaan, PPHP, Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ dan Pengelola LPSE	50	Orang	16	32%				
		Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	50	Orang	50	100%				
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam									
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rapat koordinasi/Konsultasi dalam/luar daerah bidang sumber daya alam	15	Rapat / Konsultasi	15	100%	488.320.000	19.953.900	4%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi, Ranperbup, dan Evaluasi Perbup	6	Rekomendasi /kebijakan	6	100%	214.880.000	7.920.000	4%	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Rekomendasi, Ranperbup, dan Evaluasi Perbup	6	Rekomendasi /kebijakan	6	100%	214.880.000	6.990.000	3%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga semester I Tahun 2021 relatif tidak menemukan adanya kendala yang berarti. Semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyusun kebijakan, pembinaan dan mengkoordinasikan perangkat daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat daerah, secara sederhana Untuk mengukur capaian kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi berdasarkan tabel sebagai berikut :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 - 2021**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Rencana Strategis PD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(14)		(15)
1	Persentase Aset yang dimanfaatkan dilingkungan Sekretariat Daerah			N.A	N.A	N.A	N.A	77	N.A	77	78 Persen	belum dilakukan review renstra 2016-2021
2	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A			N.A	N.A	N.A	N.A	50	N.A	50	60 Persen	belum dilakukan review renstra 2016-2022
3	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan			N.A	N.A	N.A	N.A	83	N.A	83	87 Persen	belum dilakukan review renstra 2016-2023
4	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah			N.A	N.A	N.A	N.A	76	N.A	76	77 Angka/Nilai	belum dilakukan review renstra 2016-2024
5	Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti			N.A	N.A	N.A	N.A	100	N.A	100	100 Persen	belum dilakukan review renstra 2016-2025
6	Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan			N.A	N.A	N.A	N.A	85	N.A	85	100 Persen	belum dilakukan review renstra 2016-2026
7	Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)			N.A	N.A	N.A	N.A	100	N.A	100	100 Persen	belum dilakukan review renstra 2016-2027
8	Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti			N.A	N.A	N.A	N.A	75	N.A	75	80 Persen	belum dilakukan review renstra 2016-2028
9	Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti			N.A	N.A	N.A	N.A	100	N.A	100	100 Persen	belum dilakukan review renstra 2016-2029
10	Persentase permasalahan kebijakan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan			N.A	N.A	N.A	N.A	75	N.A	75	80 Persen	belum dilakukan review renstra 2016-2030
11	Persentase pengadaan barang jasa yang diselesaikan			N.A	N.A	N.A	N.A	70	N.A	70	100 Persen	belum dilakukan review renstra 2016-2031
12	Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti			N.A	N.A	N.A	N.A	100	N.A	100	100 Persen	belum dilakukan review renstra 2016-2032

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, didasari atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD).

RENJA-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RENJA-PD mengacu pada kerangka kebuakan yang dirumuskan dalam RKPD. RKPD dan RENJA PD dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (Permendagri 86/2017, pasal 343):

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan RENJA-PD Kutai Kartanegara 2021, diperlukan perubahan dalam rangka

mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 oleh BPK.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. Sekretaris Daerah untuk kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati. Sekretariat Daerah KabupatenKutai kartanegara terdiri atas 3 Asisten; di mana Asisten masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 bagian dan setiap bagian terdiri dari 3 Sub bagian dibawahnya.

Rencana Kerja Perubahan adalah dokumen perubahan perencanaan OPD untuk tahun 2021 yang disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2021 dengan menyesuaikan kondisi terkini dan mengakomodir kebutuhan yang belum terselesaikan di tahun 2020, dan selanjutnya dokumen perubahan perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam menyelesaikan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Perubahan Rencana Kerja pada tahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Landasan Ideologi : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah.
29. Surat edaran Bupati Kutai kartanegara Nomor B-1219/BAPP/V.I/065.11.107/2021 Tanggal 02 Juli 2021 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 adalah :

1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahunan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (PRKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.
2. Dijadikan sebagai salah satu instrumen acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Tahun 2021.
3. Untuk menyesuaikan antara pembiayaan dan kondisi terkini dilapangan dalam proses penyelesaian kegiatan.
4. Sebagai parameter untuk lebih meningkatkan kinerja program, Kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun anggaran berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- b. Kaidah kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Program dan Kegiatan

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Sekretariat Daerah diantaranya:

- a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- b) Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan.

2. Pencapaian SDGs

Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Sekretariat Daerah memberikan kontribusi dalam penanganan dan upaya penegentasan kemiskinan. Terlihat dari beberapa program dan kegiatan yang disasarkan kepada kelompok marginal. Dalam hal penanganan kemiskinan, masyarakat Kutai Kartanegara yang masuk didalam program dedikasi Kepala daerah terpilih periode 2021-2025, diantaranya adanya santunan bagi warga tidak mampu, beasiswa pendidikan bagi warga tidak mampu bantuan modal usaha pertanian, perkebunan perikanan dan kelautan serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui Program Kukar Idaman, Dimana sekretariat berfungsi sebagai lembaga Koordinator, monitoring dan evaluasi terhadap capaian capaian program tersebut.

3. Pengentasan Kemiskinan.

Dalam Upaya pengentasan kemiskinan Sekretariat Daerah berperan dalam mengkoordinasikan beberapa Perangkat daerah yang kegiatannya terlibat langsung dalam proses penanganan kemiskinan. Karena dari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainnya. karena kolaborasi antar seluruh stake holder terkait sangat diperlukan dalam memecahkan masalah pengentasan kemiskinan. Dan harapanya Sekretariat Daerah ada digarda terdepan dalam upaya upaya tersebut, bukan berarti sebagai penanggungjawab utama tetapi lebih kepada perumusan strategi penanganan kemiskinan yang tepat dan sesuai dengan karakter kemiskinan wilayah.

4. Pencapaian SPM

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Dalam hal pencapaian Standar Pelayanan Minimal, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dihimpun melalui OPD Tekhnis pengampu. Untuk pelaksanaan SPM dilingkungan pemerintah daerah Kutai Kartanegara OPD tekhnis pelaksana diantaranya Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

1. Pada tahun anggaran 2021 Jumlah Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah sebanyak 3 Program dengan 20 kegiatan dan 62 Sub Kegiatan.
2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Kegiatan yang bersifat pendampingan dan ada juga yang terfokus ke satu Kecamatan atau Desa jika jenis kegiatannya bersifat Pelatihan Ketrampilan.
3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 147.133.838.683,-** dengan usulan tambahan sebesar **Rp. 155.399.268.228,-** pada anggaran perubahan untuk memenuhi kebutuhan yang belum terakomodir dan pemenuhan Kebutuhan yang bersifat Darurat.

c. Tabel Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2021 dan Perkiraan maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kode	Sebelum Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020					Sesudah Perubahan (APBD) Kepmendagri 050-3078 Tahun 2020					Bertambah/ Berkurang	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022			
	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target		PAGU INDIKATIF	Lokasi	Indikator	Target			PAGU INDIKATIF	Target		PAGU INDIKATIF
4112.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	SKPD				380.000.000					381.560.000	1.560.000			195.800.000
411 2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	2	Dok	150.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Dok	2	Dok	150.000.000	-	2	Dok	75.000.000
411 2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Lap. Pencapaian Kinerja Bagian Perlkp	2	Dok	30.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pencapai Kinerja Bagian Perleng	2	Dok	31.560.000	1.560.000	2	Dok	30.000.000
411 2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Bulan	12	Dok	200.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Bulan	12	Dok	200.000.000	-	12	Dok	90.800.000
4112.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					58.626.249. 701					62.194.029.829	3.567.780.1 28			60.737.167. 163

4112.0 2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kukar	Jumlah ASN	634	ASN	57.450.365.301	Kab. Kukar	Jumlah ASN	634	ASN	60.635.538.255	3.185.172.954	634	ASN	59.827.312.763
4112.0 2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dok Lap Kinerja Keu	4	Dok BL	185.884.400	Kab. Kukar	Jumlah Dok Lporan	4	Dok BL	185.884.400	-	4	Dok BL	100.684.400
4112.0 2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Aparat yang memahami Pnatausahaa Keu	12	Orang	200.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Aparat yang memahami Penatausahaan Keu	12	Orang	628.440.574	428.440.574	12	Org	187.370.000
4112.0 2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Rekonsiliasi Kas dan PesertRekonsiliasi	12	Dok Rekon siliasi	85.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Rekonsiliasi Kas dan Peserta Rekonsiliasi	12	Dokum en Rekonsiliasi	85.000.000	-	12	DokRe kon	50.000.000
4112.0 2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kukar	Jumlah LapKin Keuangan Kegi	1	Dok	625.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Kinerja Keu Kegiatan	1	Dokum en	579.166.600	(45.833.400)	1	Dok	521.800.000
4112.0 2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kukar	Jumlah DokRealisasi Bela 12 Bagian	2	Dok LK SKPD	80.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Dok RealisBel 12 Bag	2	Dok LK SKPD	80.000.000	-	2	Dok	50.000.000
4112.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					838.250.000					804.076.000	(34.174.000)			492.950.000
4112.0 3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Dok yang disusun	80	Buku	150.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Dok yang disusun	80	Buku	114.266.000	(35.734.000)	80	Buku	78.840.000
4112.0 3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah barang Inventaris hasil pengadaan Bag Umum yang berada pada Gudang Setkab	200	Unit	60.000.000	Kab. Kukar	Jumlah barang Inventaris hasil pengadaan Bag Umum yang berada pada Gudang Setkab	200	Unit	61.560.000	1.560.000	200	Unit	60.000.000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kukar	Jumlah data serta fisik tanah milik PemKab	1	Data	60.000.000	Kab. Kukar	Jumlah data serta fisik tanah milik Pem Kab	1	Data	60.000.000	-	1	Data	60.000.000
4112.0 3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokum en	100.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	Dokum en	150.000.000	50.000.000	1	Dok	142.660.000
4112.0 3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah barang hasil pengadaan yang ada dan yang akan diadakan serta barang purna pakai	1000	Unit	468.250.000	Kab. Kukar	Jumlah barang hasil pengadaan yang ada dan yang akan diadakan serta barang purna pakai	1000	Unit	418.250.000	(50.000.000)	1000	Unit	151.450.000
4112.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kukar				2.165.047.690	Kab. Kukar				3.914.540.760	1.749.493.070			2.165.047.510
4112.0 7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas	2	Unit	1.516.469.320	Kab. Kukar	Jumlah Kendaraan Dinas	2	Unit	367.202.600	(1.149.266.720)	2	Unit	1.516.469.320
4112.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan Prasarana Penduku Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	Unit	648.578.370	Kab. Kukar	Jumlah Sarana dan PrasaranPe nduku Gedung Kantor dan Banguna Lainnya	100	Unit	3.547.338.160	2.898.759.790	100	Unit	648.578.190
4112.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					15.863.488.584					15.856.543.105	(6.945.479)			15.863.488.584

411 2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	700 0	Surat	45.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Dok	700 0	Surat	46.560.000	1.560.000	7000	Surat	45.000.000
4112.0 8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kukar	Jumlah layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	317	Rek	7.000.000.00	Kab. Kukar	Jumlah layanan jasa KAL	317	Rekening	7.000.680.000	680.000	317	Rek	7.000.000.000
4112.0 8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Jasa Peralatan dan Prlengkapan Kantor	261	Item	2.953.689.20	Kab. Kukar	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	261	Item	2.897.064.800	(56.624.400)	261	Item	2.953.689.200
411 2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Jasa Administrasi Teknis Perkntorapada Setda	298	Orang	5.864.799.384	Kab. Kukar	Jumlah Jasa Administrsi Teknis Perk Setda	298	Orang	5.912.238.305	47.438.921	298	Orang	5.864.799.384
4112.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					244.682.620					244.500.000	(182.620)			45.000.000
411 2.05.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Dikelola dan Validasi	634	ASN	45.000.000	Kab. Kukar	Jumlah ASN yang Dikeloladan Validasi	634	ASN	46.560.000	1.560.000	634	ASN	45.000.000
411 2.05.3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kukar	Jumlah Pakaian Dinas	40	Setll	199.682.620	Kab. Kukar	Jumlah Pakaian Dinas	40	Stell	197.940.000	(1.742.620)	40	Stell	-
411 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					5.584.377.500					5.071.372.228	(513.005.272)			5.457.177.500
411 2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Peralatan dan Prlengkapan kantor	261	Item	1.140.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Peralatan dan Prlengkapn kantor	261	Item	1.120.577.800	(19.422.200)	261	Item	1.140.000.000
411 2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kukar	Jumlah Cetakan dan Pnggandaan	51	Jenis	225.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Cetakan dan Pnggandaan	51	Jenis	307.336.900	82.336.900	51	Jenis	225.000.000
411 2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kukar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	236 7	Orang/ Hari	1.000.000.000	Kab. Kukar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	236 7	Orang/ Hari	461.480.638	(538.519.362)	2367	Orang/ Hari	1.000.000.000
411 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Arsip	634	ASN	258.750.000	Kab. Kukar	Jumlah Arsip	634	ASN	260.970.000	2.220.000	634	ASN	131.550.000
411 2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kukar	Jumlah Bahan Logistik Kantor	343 60	Porsi	2.860.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Bahan Logistik Kantor	343 60	Porsi	2.820.379.390	(39.620.610)	34360	Porsi	2.860.000.000
411 2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kukar	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan permdang undangan	124 01	Eks	100.627.500	Kab. Kukar	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturape rundangan	124 01	Eks	100.627.500	-	12401	Eks	100.627.500
411 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kukar				7.027.704.778	Kab. Kukar				9.644.010.161	2.616.305.383			6.338.704.778
411 2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kukar	Jumlah layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	317	Rek	812.172.348	Kab. Kukar	Jumlah layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	317	Rek	990.364.488	178.192.140	317	Rek	812.172.348
4112.0 9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Pemeliharaa n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16	Unit	3.804.968.250	Kab. Kukar	Pemelihara an/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16	Unit	5.885.296.353	2.080.328.103	16	Unit	3.224.968.250
4112.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah pemeliharaa n/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600 0	M2	1.510.564.180	Kab. Kukar	Jumlah pemelihara an/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	600 0	M2	1.876.111.940	365.547.760	6000	M2	1.401.564.180

411 2.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kukar	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	340	Unit	900.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	340	Unit	892.237.380	(7.762.620)	340	Unit	900.000.000
4112.1 3	Penataan Organisasi					3.875.000.000					2.158.087.500	(1.716.912.500)			2.946.620.000
4112.1 31	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kukar	Jumlah Evaluasi	1	Dok	550.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Evaluasi	1	Dok	522.150.000	(27.850.000)	1	Dok	550.000.000
			Jumlah Evaluasi	34	Raperbup			Jumlah Evaluasi	34	Raperbup			34	Raperbup	
			Jumlah Dokumen	1	Dok			Jumlah Dokumen	1	Dok			1	Dok	
			Jumlah Dokumen	1	Dok			Jumlah Dokumen	1	Dok			1	Dok	
4112.1 32	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kukar	Jumlah Laporan	58	Lap	400.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Laporan	58	Lap	385.566.500	(14.433.500)	58	Lap	400.000.000
			Jumlah Evaluasi	25	Lap			Jumlah Evaluasi	25	Lap			25	Lap	
			Jumlah Dokumen	1	Dok			Jumlah Dokumen	1	Dok			1	Dok	
411 2.133	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pelaksanaan RB	2	Dok	2.725.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pelaksanaan RB	2	Dokumen	936.458.000	(1.788.542.000)	2	Dok	1.796.620.000
			Jumlah ASN	600	ASN			Jumlah ASN	600	ASN			600	ASN	
411 2.135	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen dan Aplikasi	4	Dok/Apl	200.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen dan Aplikasi	4	Dokumen/Aplikasi	313.913.000	113.913.000	4	Dok/Apl	200.000.000
4112.0 6	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					14.258.080.315					13.777.700.450	(480.379.865)			11.939.561.750
4112.1 41	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kukar	Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara	9	Kali	7.279.244.400	Kab. Kukar	Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara	9	Kali	8.097.794.000	818.549.600	9	Kali	6.969.744.400
			Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara	315	hari/hal			Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara	315	hari/halaman			315	hari/hal	
			Jumlah Dokumen PPID	100	Buah			Jumlah Dokumen PPID	100	Buah			100	Buah	
			Jumlah data informasi daerah yang ada	1000	Buku			Jumlah data informasi daerah yang ada	1000	Buku			1000	Buku	
			Jumlah Pengelolaan webside Protokol dan komunikasi publik	1550	Pertayang			Jumlah Pengelolaan webside Protokol dan komunikasi publik	1550	pertayang			1550	Pertayang	
4112.1 42	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kukar	Pengelolaan Fasilitas Protokol pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun	1	Keg	5.921.835.915	Kab. Kukar	Pengelolaan Fasilitas Protokol pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun	1	Keg	4.371.006.450	(1.550.829.465)	1	Keg	4.208.197.350
4112.1 43	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kukar	Pameran Merah Putih Sanga-Sanga	1	Keg	1.057.000.000	Kab. Kukar	Pameran Merah Putih Sanga-Sanga	1	Keg	1.308.900.000	251.900.000	1	Keg	761.620.000

			Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan tentative Pemkab	354	Kali			Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan tentative Pemkab	354	Kali			354	Kali	
			Media Cetak dan Display Informasi	3091	M2			Media Cetak dan Display Informasi	3091	M2			3091	M2	
			Pengelolaan hasil Fotografi melalui e-paper	1168	Berita Lip			Pengelolaan hasil Fotografi melalui e-paper	1168	Berita Lip			1168	Berita Lip	
			Pengelolaan hasil videografi melalui tv kabel	689	video Lip			Pengelolaan hasil videografi melalui tv kabel	689	video Lip			689	video Lip	
4112.1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					918.153.965					1.918.153.965	1.000.000.000			918.153.965
4112.11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Bupati dan Wakil Bupati	918.153.965	Kab. Kukar	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Bupati dan Wakil Bupati	918.153.965	-	2	KDH / WKDH	918.153.965
4112.113	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kukar				-	Kab. Kukar	Jumlah Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Bupati dan Wakil Bupati	1.000.000.000	1.000.000.000	2	Bupati dan Wakil Bupati	-
	Administrasi Tata Pemerintahan					1.244.912.245					1.061.422.045	(183.490.200)			1.024.912.245
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kukar	Jumlah Aparatur	6	Orang	250.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Aparatur	6	Orang	242.578.000	(7.422.000)	6	Orang	418.600.000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kukar	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	12	Kasus	534.162.245	Kab. Kukar	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani	12	Kasus	534.162.245	-	12	Kasus	355.162.245
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	460.750.000	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen	3	Dokumen	284.681.800	(176.068.200)	3	Dokumen	251.150.000
4122.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					30.737.518.900					33.604.735.800	2.867.216.900			47.206.198.203
4122.021	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kukar	Jumlah fasilitasi	1	Fasilitasi	21.010.018.900	Kab. Kukar	Jumlah fasilitasi	1	Fasilitasi	24.289.959.390	3.279.940.490	1	Fasilitasi	36.179.473.500
			Jumlah Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keagamaan	1	Berkas			Jumlah Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keagamaan	1	Berkas			1	Berkas	
			Jumlah Jama'ah Ahji Kab. Kukar	500	Orang			Jumlah Jama'ah Ahji Kab. Kukar	500	Orang			500	Orang	
			Jumlah Hewan Qurban yang disalurkan	250	Ekor			Jumlah Hewan Qurban yang disalurkan	250	Ekor			250	Ekor	
			Jumlah Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	11	Keg			Jumlah Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	11	Keg			11	Keg	
			Pelaksanaan Safari Ramadhan/ Syawal (Masjid Kab. Kukar)	18	Kec			Pelaksanaan Safari Ramadhan/ Syawal (Masjid Kab. Kukar)	18	Kec			18	Kec	
			Jumlah Peserta	19	Kecamatan			Jumlah Peserta	19	Kec			19	Kec	

			MTQ Provinsi					MTQ Provinsi							
			Jumlah Da'i	50	Dai /Desa			Jumlah Da'i	50	Dai /Desa			50	Dai /Desa	
4122.022	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi	1	Keg	175.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi	1	Keg	332.892.000	157.892.000	1	Keg	62.000.000
			Bantuan tepat sasaran kepada korban bencana	18	Kecamatan			Bantuan tepat sasaran kepada korban bencana	18	Kecamatan			18	Kec	
412.2.023	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kukar	Jumlah orang yang mengikuti Rapat	30	Orang	9.552.500.000	Kab. Kukar	Jumlah orang yang mengikuti Rapat	30	Orang	8.981.884.410	(570.615.590)	30	Orang	10.964.724.703
			Jumlah Rancangan Peraturan	3	Peraturan Bupati			Jumlah Rancangan Peraturan	3	Peraturan Bupati			3	PerBup	
			Jumlah Sekolah Berprestasi Kab. Kukar	18	Kecamatan			Jumlah Sekolah Berprestasi Kab. Kukar	18	Kecamatan			18	Kec	
			Jumlah Bagian Setkab. Yang difasilitasi	12	Bagian			Jumlah Bagian Setkab. Yang difasilitasi	12	Bagian			12	Bagian	
			Jumlah Penerima Beasiswa Gerbang Raja	8000	Pelajar /Mahasiswa			Jumlah Penerima Beasiswa Gerbang Raja	8000	Pelajar /Mahasiswa			8000	Pelajar /Mahasiswa	
			Jumlah Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kab. Ku Kar	14	Asrama			Jumlah Asrama Pelajar dan Mahasiswa Kab. Ku Kar	14	Asrama			14	Asrama	
4122.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					1.025.008.000					862.625.200	(162.382.800)			1.025.008.000
412.2.031	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kukar	Jumlah Ketetapan Keputusan	500	SK	500.008.000	Kab. Kukar	Jumlah Ketetapan Keputusan	500	SK	388.845.000	(111.163.000)	500	SK	500.008.000
			Jumlah Peraturan Desa	PerDes	10			Jumlah Peraturan Desa	PerDes	10			PerDes	10	
			Jumlah Perbup	30	Prbup			Jumlah Perbup	30	PerBup			30	PerBup	
4122.032	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	4	Do	350.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)	4	Dok	328.183.000	(21.817.000)	4	Dok	350.000.000
			Jumlah Penanganan Kasus/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	6	Prkara			Jumlah Pnanganan Kasus/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	6	Prkara			6	Prkara	
4122.033	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kukar	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	15	Orang/Hari/Keg	175.000.000	Kab. Kukar	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	15	Orang/Hari/Kegi	145.597.200	(29.402.800)	15	Orang/Hari/Keg	175.000.000
			Jumlah Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	1	Web			Jumlah Pngelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)	1	Wbsite			1	Wbsite	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah					808.514.000					638.819.000	(169.695.000)			1.408.514.000

	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kukar	Jumlah Kerja Sama	10	Kerja Sama	250.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Kerja Sama	10	Kerja Sama	193.435.000	(56.565.000)	10	Kerja Sama	550.000.000
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kukar	Jumlah Kerja Sama Luar Negeri	1	Kerja Sama	308.514.000	Kab. Kukar	Jumlah Kerja Sama Luar Negeri	1	Kerja Sama	251.997.000	(56.517.000)	1	Kerja Sama	608.514.000
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kukar	Jumlah Evaluasi Kinerja	8	Lap	250.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Evaluasi Kinerja	8	Lap	193.387.000	(56.613.000)	8	Lap	250.000.000
413 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kukar				643.750.000	Kab. Kukar				540.613.600	(103.136.400)			718.750.000
413 2.011	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kukar	jumlah perusda yang dievaluasi	1	Prusda	265.000.000	Kab. Kukar	jumlah perusda yang dievaluasi	1	Prusda	222.600.000	(42.400.000)	1	Prusda	340.000.000
			Jumlah kecamatan yang dievaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi	18	Kecamatan			Jumlah kecamatan yang dievaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi	18	Kecamatan			18	Kecamatan	
			Jumlah OPD dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara	35	Layanan			Jumlah OPD dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Kab. Kukar	35	Layanan			35	Layanan	
4132.0 12	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	10	Kecamatan	231.250.000	Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	10	Kecamatan	185.210.000	(46.040.000)	10	Kecamatan	231.250.000
			Jumlah Objek Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahan berbahaya	9	Kecamatan			Jumlah Objek Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahan berbahaya	9	Kecamatan			9	Kecamatan	
			Jumlah Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah	1	Rakor			Jumlah Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah	1	Rakor			1	Rakor	
4132.0 13	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	40	Rakor	147.500.000	Kab. Kukar	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	40	Rakor	132.803.600	(14.696.400)	40	Rakor	147.500.000
			Jumlah Pnyelesaian KUKP	18	Kecamatan			Jumlah Pnyelesaian KUKP	18	Kecamatan			18	Kecamatan	
4132.0 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kukar				621.100.385	Kab. Kukar				816.425.285	195.324.900			656.100.385
4132.0 21	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kukar	Jumlah Pnyelesaian KUKP	18	Laporan	180.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Pnyelesaian KUKP	18	Laporan	146.638.900	(33.361.100)	18	Laporan	215.000.000
413 2.022	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kukar	Jumlah laporan Monitoring dan Pngendalian	5	Laporan	281.350.385	Kab. Kukar	Jumlah laporan Monitoring dan Pngendalian	5	Laporan	560.316.385	278.966.000	5	Laporan	281.350.385
4132.0 23	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kukar	Jumlah Aplikasi	1	Aplikasi	159.750.000	Kab. Kukar	Jumlah Aplikasi	1	Aplikasi	109.470.000	(50.280.000)	1	Aplikasi	159.750.000
			Jumlah Laporan	1	Laporan			Jumlah Laporan	1	Laporan			1	Laporan	
			Jumlah monitoring laporan dan Evaluasi	4	Laporan			Jumlah monitoring laporan dan Evaluasi	4	Laporan			4	Laporan	
413 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kukar				1.325.000.000	Kab. Kukar				1.188.138.500	(136.861.500)			1.325.000.000
413 2.031	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kukar	Jumlah Penunjang Kegiatan PBJ	183	Jumlah Paket	500.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Penunjang Kegiatan PBJ	183	Jumlah Paket	400.421.000	(99.579.000)	183	Jumlah Paket	500.000.000

			Pelaksanaan Inventarisasi Paket, Pelaksanaan Riset dan Analisis Pasar dan Rapat Koordinasi	58	OPD			Plaksanaan Inventarisasi Paket, Pelaksanaan Riset dan Analisis Pasar dan Rapat Koordinasi	58	OPD			58	OPD	
413 2.032	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kukar	Jumlah Aplikasi	1	Aplikasi	300.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Aplikasi	1	Aplikasi	164.400.000	(135.600.000)	1	Aplikasi	300.000.000
			Jumlah OPD yang Dilayani	58	OPD			Jumlah OPD yang Dilayani	58	OPD			58	OPD	
			Jumlah Website	1	Website			Jumlah Website	1	Website			1	Web	
413 2.033	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kukar	Jumlah Administrasi dan kebutuhan operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	3	Sub Bagian	525.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Administrasi dan kebutuhan operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa	3	Sub Bagian	623.317.500	98.317.500	3	Sub Bag	525.000.000
			Jumlah OPD	58	OPD			Jumlah OPD	58	OPD			58	OPD	
			Jumlah Pokja, Pejabat Pengadaan, PPHP, Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ dan Pengelola LPSE	50	Orang			Jumlah Pokja, Pejabat Pengadaan, PPHP, Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ dan Pengelola LPSE	50	Orang			50	Org	
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Pengadaan BarJas Pem	50	Orang			Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Pengadaan BarJas Pem	50	Orang			50	Org	
413 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kukar				947.000.000	Kab. Kukar				721.914.800	(225.085.200)			947.000.000
413 2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kukar	Jumlah Rapat koordinasi/Konsultasi dalam/luar daerah bidang sumber daya alam	15	Rapat / Konsultasi	499.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Rapat koordinasi/Konsultasi dalam/luar daerah bidang sumber daya alam	15	Rapat / Konsultasi	381.539.000	(117.461.000)	15	Rapat/Konsultasi	499.000.000
413 2.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kukar	Jumlah Rekomendasi, Ranperbup, dan Evaluasi Perbup	6	Rekomendasi/kebijakan	224.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Rekomendasi, Ranperbup, dan Evaluasi Perbup	6	Rekomendasi/kebijakan	172.310.000	(51.690.000)	6	Rekomendasi/kebijakan	224.000.000
413 2.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kukar	Jumlah Rekomendasi, Ranperbup, dan Evaluasi Perbup	6	Rekomendasi/kebijakan	224.000.000	Kab. Kukar	Jumlah Rekomendasi, Ranperbup, dan Evaluasi Perbup	6	Rekomendasi/kebijakan	168.065.800	(55.934.200)	6	Rekomendasi/kebijakan	224.000.000
			Total APBD			147.133.838.683	Total APBD Perubahan			155.399.268.228	8.265.429.545	Total APBDP	161.411.154.083		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021, proses penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2021 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2021 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2021. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 terdiri dari 3 program dan 19 kegiatan serta 63 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 147.133.838.683,- dan usulan tambahan sebesar Rp. 155.399.268.228,- pada anggaran perubahan untuk memenuhi kebutuhan yang belum terakomodir dan pemenuhan Kebutuhan yang bersifat Darurat. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Tahun Anggaran 2021

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Berdasarkan panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk kurun waktu satu tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja PD Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kurun waktu 2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen seluruh ASN Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra perlu dievaluasi berkala untuk menjamin bahwa target kinerja yang telah disusun masih relevan dengan kebutuhan perkembangan permasalahan sosial.

c. Rencana tindak lanjut ;

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perubahan Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan.. Perencanaan perubahan ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai. Akhirnya semoga Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja P) PD ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akhirnya semoga Dokumen Perubahan Renja Perubahan tahun 2021 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.

Tenggarong, 5 Juli 2021

Sekretaris Daerah

Drs. H. Sunggono, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19671004 198701 1 001